

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi yang besar dan beragam. Dengan jumlah penduduk yang banyak, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta lokasi geografis yang strategis, Indonesia menarik minat dari investor asing dan dalam negeri untuk melakukan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi ini memiliki potensi untuk membawa dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan perkembangan infrastruktur di negara ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, investasi asing (PMA) didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun dengan bermitra dengan investor domestik. Investor asing meliputi individu warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan investasi di wilayah Negara Republik Indonesia.

PMA merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing di suatu negara. Hal ini mencakup investasi dalam bentuk modal, teknologi, dan sumber daya manusia. PMA memiliki potensi untuk membawa modal asing ke dalam perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan teknologi, dan membuka peluang ekspor.

Di sisi lain, Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah tindakan mengalokasikan modal untuk menjalankan usaha di dalam wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pelaku usaha

dengan kewarganegaraan Indonesia dan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri. Pelaku PMDN bisa berupa individu warga negara Indonesia, badan usaha berbasis Indonesia, pemerintah Republik Indonesia, atau lembaga daerah yang melakukan investasi di wilayah Republik Indonesia. Jenis investasi ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. PMDN dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung perkembangan industri dalam negeri, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Adanya investasi PMA di suatu wilayah dapat membawa berbagai dampak. Pertama, investasi PMA dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk setempat. Kedua, investasi PMA dapat menghasilkan pendapatan pajak bagi pemerintah, yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Ketiga, investasi PMA dapat memajukan teknologi dan infrastruktur di wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, investasi PMA juga memiliki potensi dampak negatif. Misalnya, terdapat risiko eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan atau merusak lingkungan hidup. Selain itu, investasi PMA juga dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi jika manfaatnya tidak tersebar secara adil di masyarakat.

Investasi PMDN juga memiliki dampak yang serupa dan beragam. Investasi ini dapat menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja. Di samping itu, perusahaan-perusahaan PMDN sering kali memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, yang bisa termasuk program-program pengentasan kemiskinan.

Table 1.1 Realisasi Investasi Kuartalan (Maret 2019-Maret 2022)

No	Waktu	PMA / Rp Triliun	PMDN / Rp Triliun
----	-------	------------------	-------------------

No	Waktu	PMA / Rp Triliun	PMDN / Rp Triliun
1	2019-03-31	107,9	87,2
2	2019-06-30	104,9	95,6
3	2019-09-30	105	100,7
4	2019-12-31	105,3	103
5	2020-03-31	98	112,7
6	2020-06-30	97,6	94,3
7	2020-09-30	106,1	102,9
8	2020-12-31	111,1	103,6
9	2021-03-31	111,7	108
10	2021-06-30	116,8	106,2
11	2021-09-30	103,2	113,5
12	2021-12-31	122,3	119,3
13	2022-03-31	147,2	135,2

Sumber: BPS, diolah 2023

Seperti yang terlihat pada table di atas, dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam PMA dan PMDN. Kebijakan pemerintah, seperti penyederhanaan regulasi investasi dan insentif fiskal, telah mendukung iklim investasi yang lebih ramah. Namun, pertanyaan muncul tentang dampak sebenarnya dari investasi ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk memahami bagaimana investasi asing dan dalam negeri dapat memengaruhi berbagai aspek perekonomian Indonesia, termasuk kemiskinan.

Indonesia adalah salah satu negara anggota ASEAN yang sedang berkembang dan melihat investasi sebagai sumber utama untuk pembangunan ekonomi, modernisasi, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan yang memerlukan perhatian serius. Masalah kemiskinan harus mendapat perhatian khusus karena masih menjadi topik utama di masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, kekurangan bahan makanan, dan tingginya angka pengangguran. Keadaan ini menandakan bahwa kemiskinan di Indonesia masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Menurut *World Bank* (2019) Kemiskinan secara operasional didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini mencakup ketidakmampuan memperoleh pangan yang cukup, tempat tinggal yang layak, dan layanan kesehatan saat sakit. Selain itu, kemiskinan mencakup ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan, yang berakibat pada buta huruf, serta ketiadaan pekerjaan yang menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan. Kemiskinan juga mencakup sanitasi yang buruk, serta ketidakberdayaan dalam ranah politik dan kurangnya kebebasan.

Di Indonesia, definisi kemiskinan yang digunakan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih terfokus pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar. Kemiskinan diukur berdasarkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan, yang ditetapkan sebesar 2100 kilokalori per kapita per hari, serta kebutuhan dasar non-makanan. Oleh karena itu, kemiskinan dipandang dari sudut pandang ekonomi sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, dua perspektif ini menggambarkan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang kompleks, yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan ekonomi, tetapi juga mencakup

berbagai aspek kehidupan yang mendasar dan memengaruhi kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Kemiskinan tetap menjadi permasalahan serius di Indonesia. Meskipun ada penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, masih ada jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berdampak pada akses pendidikan yang terbatas, kesehatan yang buruk, dan ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan tetap menjadi prioritas nasional.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat yang saling berkaitan. Hal ini pemerintah Indonesia belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita masyarakat miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Bila dilihat dalam konteks agama sebenarnya sudah sangat jelas. Dalam Islam dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut sebagai miskin dan mereka yang masuk golongan fakir, orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya, sementara orang fakir adalah mereka yang memiliki potensi yang belum direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Agama Islam menjelaskan bagaimana pandangan mengenai kemiskina, firma Allah SWT. dalam Q.S. Al-Ma'un/107 :1-3 yang berbunyi:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. (Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, hal. 530).

Makna dari ayat di atas mengajarkan bahwa iman yang benar harus tercermin dalam tindakan nyata yang melindungi dan membantu orang miskin dan anak yatim. Mengabaikan

kewajiban sosial ini dianggap sebagai bentuk pendustaan agama. Oleh karena itu, dalam konteks kemiskinan, Al-Qur'an menekankan tanggung jawab sosial yang kuat dan mendorong tindakan nyata dalam membantu mereka yang kurang beruntung.

Kalimantan Selatan, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, juga menghadapi tantangan serupa dalam mengurangi angka kemiskinan. Provinsi ini memiliki berbagai potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor sumber daya alam seperti pertambangan, kelapa sawit, dan energi. Dalam beberapa tahun terakhir, Kalimantan Selatan menerima investasi dari dalam negeri dan luar negeri, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Untuk memahami konteks kemiskinan di Kalimantan Selatan, kita perlu melihat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini. Provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan. Namun, tingkat kemiskinan masih tinggi, terutama di daerah pedesaan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Kalimantan Selatan termasuk keterbatasan akses ke pendidikan, keterbatasan akses ke layanan kesehatan, ketergantungan pada sektor tertentu, serta ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

Indonesia memiliki tekad kuat untuk meningkatkan investasi sebagai salah satu strategi utama dalam mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Keinginan ini didorong oleh pemahaman bahwa investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Melalui insentif-insetif perpajakan, penyederhanaan regulasi, dan upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Indonesia berharap dapat menarik investasi domestik dan asing yang lebih besar. Investasi ini kemudian diharapkan dapat menggerakkan sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, pertanian, dan industri manufaktur, yang pada gilirannya akan berdampak

positif pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan investasi juga mencakup pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga tenaga kerja Indonesia dapat lebih siap menghadapi tuntutan pasar global yang semakin kompleks. Dengan upaya ini, Indonesia berharap dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan merangsang penurunan kemiskinan di seluruh negeri.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah menyetujui Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja yang disahkan pada Oktober 2020 telah menjadi sorotan sejak pembahasan rancangannya diumumkan pada tahun 2019. Undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, sehingga berpotensi meningkatkan perekonomian Indonesia secara signifikan. Melalui berbagai reformasi regulasi dan penyederhanaan birokrasi, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menarik lebih banyak investor domestik dan asing, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Langkah ini diharapkan akan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global, mengurangi hambatan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami dinamika ekonomi yang signifikan, di mana investasi asing dan dalam negeri memiliki peran yang berbeda dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. PMA sering kali membawa teknologi tinggi dan manajemen modern yang berpotensi mengubah struktur industri lokal, sementara PMDN memberikan kontrol yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan industri lokal yang mandiri.

Memisahkan PMA dan PMDN sebagai variabel terpisah memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap karakteristik unik masing-masing jenis investasi. Hal ini penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna memaksimalkan manfaat ekonomi dari setiap jenis investasi, serta untuk mengelola risiko yang mungkin terkait dengan kedua jenis investasi tersebut. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari PMA dan PMDN, yang merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat merespons kebutuhan lokal serta dinamika global yang terus berubah.

Dengan menjaga PMA dan PMDN sebagai variabel terpisah dalam analisis investasi, kita dapat mengembangkan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan responsif untuk memahami serta mengelola pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan secara holistik dan berkelanjutan.

Investasi, baik PMA maupun PMDN, memiliki potensi untuk memengaruhi kondisi ekonomi dan kemiskinan di Kalimantan Selatan. Namun, efek sebenarnya dari investasi ini belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak investasi asing dan dalam negeri terhadap angka kemiskinan di wilayah Kalimantan selatan. Meskipun potensi dampak positif dan negatif tersebut telah diidentifikasi, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana investasi PMA dan PMDN telah berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Penelitian tentang pengaruh penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap kemiskinan telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia dengan hasil yang berbeda-beda. Suryatno Wiganepdo S dan Herman Soegoto (2022) dalam jurnal JURISMA menemukan bahwa PMDN dan PMA secara signifikan menurunkan



kemiskinan di tingkat nasional, meskipun ada beberapa provinsi yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Penelitian oleh Nabila Nurfadilah Rachmat di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara PMDN berpengaruh signifikan secara langsung. Sementara itu, Luqyana Mufidah dan M. Yudhi Lutfi di Provinsi Banten menemukan bahwa PMA dan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian terkait dampak spesifik investasi terhadap kemiskinan di wilayah ini, terutama dalam konteks periode pasca-pandemi COVID-19.

Berdasarkan penjelasan di atas yang telah dijelaskan dan permasalahan yang ada, penulis merasa tertarik untuk menjalankan sebuah penelitian yang akan direfleksikan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Angka Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara parsial berpengaruh terhadap angka kemiskinan di provinsi Kalimantan selatan tahun 2019-2022?
2. Apakah penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara simultan berpengaruh terhadap angka kemiskinan di provinsi Kalimantan selatan tahun 2019-2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara parsial terhadap angka kemiskinan di provinsi Kalimantan selatan tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara simultan terhadap angka kemiskinan di provinsi Kalimantan selatan tahun 2019-2022.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang berharga bagi penelitian-penelitian serupa di masa depan, serta menjadi sumber rujukan yang berguna untuk penelitian yang lebih lanjut. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran keilmuan terkait dengan penanaman modal asing dan domestik, serta dampaknya terhadap tingkat kemiskinan.

2. Secara praktis

- a. Bagi akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks penanaman modal asing dan domestik, serta dampaknya terhadap tingkat kemiskinan. Sebagai hasilnya,

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang bermanfaat di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin untuk dimanfaatkan secara optimal..

b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berperan sebagai sumber informasi yang berguna untuk memahami secara lebih mendalam tentang besarnya investasi asing dan domestik, serta dampaknya terhadap tingkat kemiskinan.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan sebagai referensi bagi penelitian yang terkait dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta pengaruhnya terhadap angka kemiskinan. Kegunaan penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi baik bersifat teoretik-akademik maupun praktis.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk Menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan peneliti teliti dan sebagai pegangan agar lebih fokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Penanaman modal asing (PMA)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing (PMA) di definisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. PMA yang dimaksud di sini adalah realisasi investasi yang dilakukan oleh warga Negara asing (WNA) di 9 kabupaten di

provinsi Kalimantan Selatan yakni kabupaten [Balangan](#), kabupaten [Banjar](#), kabupaten [Barito Kuala](#), kabupaten [Hulu Sungai Tengah](#), kabupaten [Kotabaru](#), kabupaten [Tabalong](#), kabupaten [Tanah Bumbu](#), kabupaten [Tanah Laut](#), dan kabupaten [Tapin](#). Serta 2 Kota di provinsi Kalimantan Selatan yakni kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru, dari tahun 2019 sampai 2022.

## 2. Penanaman modal dalam negeri (PMDN)

Menurut UU no. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara RI atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. PMDN yang dimaksud di sini adalah realisasi investasi yang dilakukan warga Negara Indonesia (WNI) di 9 kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan yakni kabupaten [Balangan](#), kabupaten [Banjar](#), kabupaten [Barito Kuala](#), kabupaten [Hulu Sungai Tengah](#), kabupaten [Kotabaru](#), kabupaten [Tabalong](#), kabupaten [Tanah Bumbu](#), kabupaten [Tanah Laut](#), dan kabupaten [Tapin](#). Serta 2 Kota di provinsi Kalimantan Selatan yakni kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru, dari tahun 2019 sampai 2022.

## 3. Kemiskinan

Menurut KBBI, kemiskinan adalah keadaan tidak berharta atau serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Menurut *World Bank* (2019) secara operasional mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, sakit yang tidak mampu untuk berobat, ketiadaan akses ke

sekolah dan ketidakmampuan membaca, tidak adanya pekerjaan dan kekhawatiran akan kehidupan di masa yang akan datang, sanitasi yang buruk, serta ketidakberdayaan dan kebebasan dalam politik. Kemiskinan yang dimaksud peneliti adalah angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin yang ada di 9 kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan yakni kabupaten [Balangan](#), kabupaten [Banjar](#), kabupaten [Barito Kuala](#), kabupaten [Hulu Sungai Tengah](#), kabupaten [Kotabaru](#), kabupaten [Tabalong](#), kabupaten [Tanah Bumbu](#), kabupaten [Tanah Laut](#), dan kabupaten [Tapin](#). Serta 2 Kota di provinsi Kalimantan Selatan yakni kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru, dari tahun 2019 sampai 2022.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan data, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti.

Penelitian pertama dari Muhammad Akbar Ramadhani (180105010333) dari UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2022 berjudul "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Absolut di Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2011-2020". Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan memiliki pengaruh simultan dan parsial terhadap Kemiskinan Absolut di Kabupaten Hulu Sungai Utara selama periode tersebut. Jenis penelitian adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan software SPSS 26. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa semua variabel bebas, yakni IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan, secara simultan berpengaruh terhadap Kemiskinan Absolut di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara parsial, IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan absolut, sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan absolut.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pendekatan kuantitatif dan penggunaan analisis statistik untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap kemiskinan. Kedua penelitian ini menggunakan data sekunder dari instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber utama data mereka. Selain itu, keduanya bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan di wilayah penelitian masing-masing. Penelitian yang akan dilakukan juga mengadopsi metode studi kepustakaan seperti yang diterapkan oleh Ramadhani.

Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus geografis dan temporal. Penelitian Ramadhani berfokus pada Kabupaten Hulu Sungai Utara selama periode 2011-2020, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2019-2022. Penelitian yang baru ini mencakup masa pandemi COVID-19 dan pasca-pandemi, memberikan konteks yang unik dan relevan dalam mengevaluasi pengaruh investasi terhadap kemiskinan. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan akan meneliti secara khusus pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang tidak dibahas secara spesifik dalam penelitian Ramadhani. Keterbaruan lainnya adalah analisis dampak peraturan *Omnibus Law* terhadap investasi dan kemiskinan serta penggunaan analisis regresi

data panel yang melibatkan berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, menawarkan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai hubungan antar variabel.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah oleh Irfandi (2021) dengan judul "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat" bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tingkat pendidikan dan investasi mempengaruhi kemiskinan melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder jenis time series dari tahun 2012 hingga 2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat. Metode yang diterapkan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara investasi menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan. Selain itu, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dalam pendekatan kuantitatif dan penggunaan data sekunder untuk mengevaluasi pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap kemiskinan. Keduanya menggunakan analisis statistik untuk memahami hubungan antara variabel-variabel kunci, meskipun dengan metode analisis yang sedikit berbeda. Selain itu, kedua penelitian fokus pada dampak investasi sebagai salah satu variabel utama yang mempengaruhi kemiskinan di wilayah tertentu.

Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus geografis dan temporalnya. Penelitian Irfandi berfokus pada Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2012-2021, sementara penelitian yang akan dilakukan

berfokus pada Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2019-2022, yang mencakup periode pandemi COVID-19 dan pasca-pandemi. Selain itu, penelitian yang baru ini memperhitungkan pengaruh spesifik dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap kemiskinan, serta dampak dari peraturan Omnibus Law. Penggunaan metode analisis regresi data panel dalam penelitian ini juga memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi hubungan antar variabel di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, memberikan keterbaharuan yang signifikan dalam konteks penelitian ekonomi regional.

Penelitian berikutnya yakni yang dilakukan oleh Intania Widya Sari dengan judul "Analisis Investasi di Indonesia terhadap Kemiskinan dan Pengangguran dengan Variabel Intervening Pertumbuhan Ekonomi" merupakan sebuah skripsi yang diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Penelitian ini berfokus pada 10 provinsi dengan investasi tertinggi di Indonesia selama periode 2011-2019. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan data panel, yang mencakup data cross-section dan time series. Metode analisis yang digunakan adalah path analysis untuk mengidentifikasi pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel independen (investasi) terhadap variabel dependen (kemiskinan dan pengangguran) melalui variabel intervening (pertumbuhan ekonomi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berperan signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan secara langsung membantu mengurangi kemiskinan serta pengangguran di wilayah yang dianalisis.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul "Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

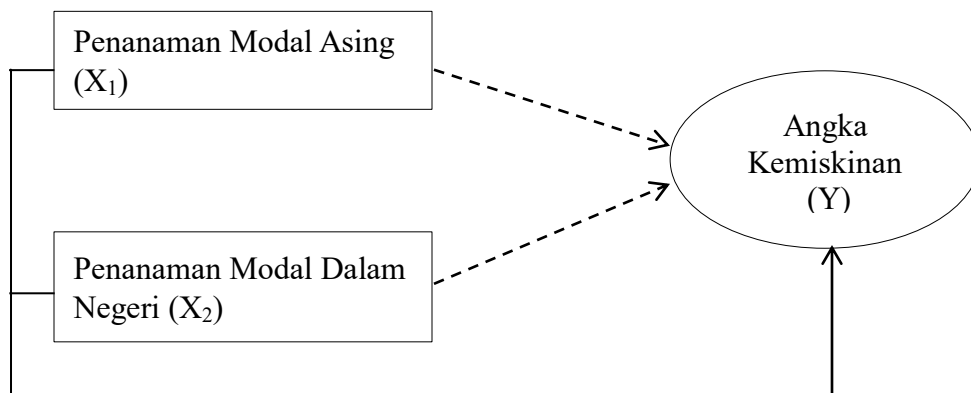


terhadap Angka Kemiskinan di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2022". Keduanya sama-sama berfokus pada analisis investasi dan pengaruhnya terhadap kemiskinan. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis statistik yang mendalam untuk mengevaluasi hubungan antara investasi dan kemiskinan. Kedua penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

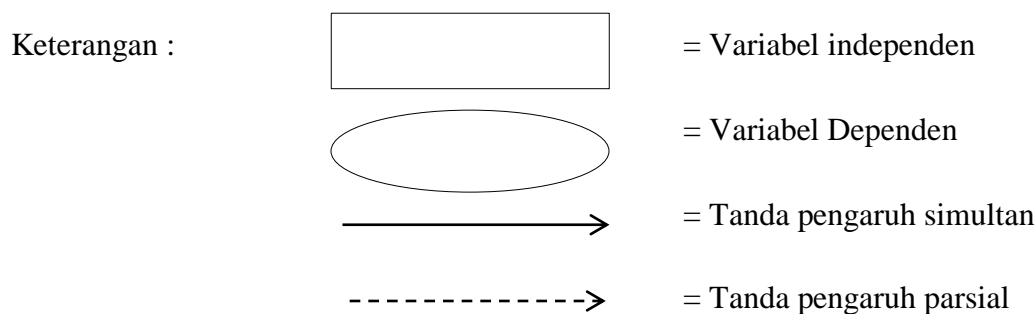
Namun, terdapat beberapa perbedaan dan elemen keterbaruan dalam penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian Intania Widya Sari. Penelitian yang akan dilakukan berfokus secara spesifik pada Provinsi Kalimantan Selatan, berbeda dengan penelitian Intania yang mencakup 10 provinsi dengan investasi tertinggi di Indonesia. Periode analisis juga berbeda; penelitian yang akan dilakukan mencakup tahun 2019-2022, yang meliputi masa pandemi COVID-19 dan periode pasca-pandemi, memberikan konteks unik dan relevan dalam memahami dampak investasi terhadap kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan pengaruh peraturan *Omnibus Law* terhadap investasi, yang merupakan isu kebijakan terbaru dan signifikan. Dengan menggunakan metode analisis regresi data panel yang mencakup berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai hubungan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap kemiskinan, serta memberikan kontribusi baru dalam literatur terkait.

## **G. Kerangka Berfikir**

Untuk menggambarkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini maka dibutuhkan kerangka pikir dengan tujuan untuk memperjelas alur pemikiran yang direncanakan oleh peneliti. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1  
Kerangka pemikiran



Sumber: Data diolah, 2023

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah sebuah pernyataan yang kebenarannya tidak diketahui pada saat diungkapkan, tetapi dapat diverifikasi secara empiris (Gulo, 2002, hlm. 42). Hipotesis merupakan dugaan sementara yang di dalamnya mengandung sebuah kemungkinan benar atau juga kemungkinan salah. Hipotesis tersebut akan ditolak jika ternyata salah, dan hipotesis tersebut akan diterima jika ternyata fakta-fakta dibenarkan. Oleh karena itu peneliti akan mengajukan hipotesis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  $H_0$ : ada pengaruh secara parsial antara Penanaman Modal Asing ( $X_1$ ) dan Penanaman Modal Dalam Negeri ( $X_2$ ), terhadap angka kemiskinan ( $Y$ ) di Kalimantan Selatan tahun 2019-2022.
2.  $H_1$ : Tidak ada pengaruh secara parsial antara Penanaman Modal Asing ( $X_1$ ) dan Penanaman Modal Dalam Negeri ( $X_2$ ), terhadap angka kemiskinan ( $Y$ ) di Kalimantan Selatan tahun 2019-2022.
3.  $H_2$ : ada pengaruh secara simultan antara Penanaman Modal Asing ( $X_1$ ) dan Penanaman Modal Dalam Negeri ( $X_2$ ), terhadap angka kemiskinan ( $Y$ ) di Kalimantan Selatan tahun 2019-2022.
4.  $H_3$ : tidak ada pengaruh secara simultan antara Penanaman Modal Asing ( $X_1$ ) dan Penanaman Modal Dalam Negeri ( $X_2$ ), terhadap angka kemiskinan ( $Y$ ) di Kalimantan Selatan tahun 2019-2022.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini menggambarkan struktur penelitian yang akan dilakukan.

Bab I akan memperkenalkan pembaca pada konteks latar belakang penelitian, termasuk rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan kerangka berfikir yang melandasi penelitian. Selain itu, bab ini juga akan membahas definisi operasional, telaah penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

Bab II akan membahas landasan teori yang menjadi pondasi dalam penelitian ini. Di sini, akan dipaparkan beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori tentang penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan fenomena kemiskinan.

Bab III akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan secara detail. Ini mencakup deskripsi tentang bagaimana penelitian dilakukan, pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis yang akan digunakan untuk menganalisis data.

Bab IV akan memaparkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Di sini, akan disajikan temuan-temuan dari penelitian mengenai pengaruh penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Bab V merupakan bab penutup yang akan memberikan kesimpulan dari temuan penelitian serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil analisis. Dengan demikian, bab ini akan menjadi titik akhir yang melengkapi keseluruhan penelitian.